

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PATIALA DETE KECAMATAN LABOYA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT

Ni Nyoman Juwita Arsawati¹, Soleman Honga Laja², Ni Putu Bayu Widhi Antari³

¹Universitas Pendidikan Nasional

²Universitas Pendidikan Nasional

³Universitas Pendidikan Nasional

bayuwidhiantari@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Distribution of village fund is a follow-up to the government's program for developing Indonesia from the periphery by strengthening villages within the framework of a unitary state. This distribution aims to improve welfare and equitable development in Indonesia. This paper aims to examine the effectiveness of village fund management in Patiala Dete Village, Laboya Barat District, West Sumba Regency. This research uses a qualitative approach. In term of the research time, this research is classified as cross-sectional research. The data is collected by observation, desk study, and in-depth interviews with key actors in Patiala Dete Village, Laboya Barat District, West Sumba Regency. The informants are chosen by purposive sampling. Triangulation is utilized to test data credibility. Based on data analysis, the village fund was managed effectively regarding the realization of work programs funded by the village fund. Implemented work programs are suitable with planned work programs. Nevertheless, the effectiveness of village fund management is influenced by the punctuality of village fund distribution and the occurrence of natural disasters in Patiala Dete Village.

Keywords: Village Fund Management, Effectiveness, Decentralization

ABSTRAK

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemberian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggali bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ditinjau dari segi waktu, penelitian ini termasuk penelitian cross-sectional. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam kepada pihak Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Berdasarkan hasil analisis data, dana desa sudah dikelola dengan efektif yang ditinjau dari kesesuaian antara program kerja yang direncanakan dengan program kerja yang direalisasikan. Walaupun demikian, terhambatnya pencairan dana desa menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian program kerja yang didanai oleh dana desa. Selain itu, efektivitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi di Desa Patiala Dete.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Efektivitas, Desentralisasi

PENDAHULUAN

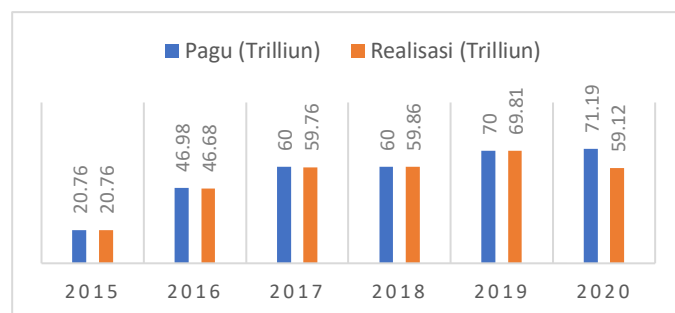
Pembangunan Desa kini menekankan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan. Perubahan cara pandang ini didukung oleh keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Sesuai dengan amanat UU tersebut, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Upaya ini didukung dengan adanya pemberian dana desa ke setiap desa di Indonesia.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan kedisiplinan pengelolaan anggaran. Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana desa ini diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini diberikan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar desa,

meningkatkan perekonomian desa, dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa. Jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa (Kementerian Keuangan 2017).

Penyerapan dana desa di Indonesia berada di atas 99 % dari tahun 2015-2020. Berikut data dari Kementerian Keuangan (2021) terkait realisasi penyerapan anggaran dana desa tahun 2015-2020.

Grafik 1. Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan data di atas, penyerapan dana desa tertinggi pada tahun 2015 yakni sebesar 100%, sedangkan penyerapan terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 83.05%. Pemberian dana desa ini berdampak pada kemandirian desa. Pada tahun 2015, 0,3% desa tergolong dalam desa mandiri, sedangkan pada tahun 1,11% desa di Indonesia tergolong dalam desa mandiri (Kementerian Keuangan 2021).

Desa Patiala Dete yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Patiala Dete adalah salah satu desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan dana desa oleh Pemerintah Desa Patiala Dete yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I, tahap II dan tahap III tahun 2018 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan jalan pengerasan. Sedangkan dana desa tahap III tahun 2018 digunakan untuk pembangunan rumah layak huni bagi keluarga yang kurang mampu (Jefrianus Kahale, 2018).

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa harus sesuai dengan kualitas yang ada, dimana pembangunan jalan pengerasan yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan standar pelaksanaan kerja yang ada. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di Desa Patiala Dete. Adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar

badan jalan dan bibir jalan setelah dua tahun selesai. Sejalan dengan hal tersebut sarana pembangunan fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana pembangunan fisik tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun, tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karena dilihat dari kondisi fisik jalan tersebut. Selain itu, pembangunan jalan tersebut harus disertai dengan pembuatan saluran drainase sehingga pada saat musim hujan, air yang mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah di sekitar jalan tersebut tidak terkuras air. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan pengerasan kurang sesuai, karena dalam perencanaannya sepanjang akses jalan 3 KM yang ada di Desa Patiala Dete akan dibangun jalan pengerasan yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, pembangunan jalan pengerasan baru terelease 2,5 KM (Jefrianus Kahale, 2018).

Kemudian Dana Desa tahap ketiga 2018 yang digunakan untuk bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga yang kurang mampu dimana hal ini kepala desa memilih keluarga dalam memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni. Dalam perencanaannya keluarga tidak mampu yang mendapatkan bantuan rumah layak huni, Setelah dana desa terealisasi masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan rumah

layak huni sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Masyarakat Desa Patiala Dete (Jefrianus Kahale, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat? Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan Pustaka terhadap konsep efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah.

Efektifitas

Konsep efektivitas telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Menurut Siagian (2002:31), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut Peter.F.Drucker yang dikutip Moenir

(2006:166), efektivitas merupakan kemampuan memilih sasaran. Menurut Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektifitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 2015). Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program secara efektif apabila mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta mampu memilih sasaran, dengan demikian ouputnya semakin besar terhadap tujuan yang dicapai. Efektivitas dapat menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai: "Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Halim 2007). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut: pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang dapat dilakukan; Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah; Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya; Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif, transparansi, dan akuntabilitas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sari, Ribawanto, dan Said (2015) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan; jumlah dana desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas; kurangnya intensitas sosialisasi dana desa pada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggali makna (*meaning*) efektivitas penggunaan dana desa dari sudut pandang pejabat pemerintah desa dan masyarakat Desa Patiala Dete. Penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross-sectional* (Neuman, 2007). Penelitian dilakukan dari Oktober sampai Desember 2021 dan hasil penelitian antar bulan tidak diperbandingkan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam kepada kepala desa, bendahara Desa, kaur pelaksanaan program desa, tokoh masyarakat (Toko Adat), dan tokoh masyarakat perempuan (Kelompok Tenun). Data sekunder juga digunakan. Data ini berupa laporan pengelolaan dana desa. Salah satu peneliti adalah masyarakat desa Patiala dete secara tidak langsung ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian melakukan triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi Teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan dengan teknik yang berbeda (melalui wawancara, observasi, dokumentasi). Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan beberapa sumber.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan kondisi geografis Desa Patiala Dete dan analisis efektivitas pengelolaan dana Desa Patiala Dete.

Kondisi Geografis Desa Patiala Dete

Desa Patiala Dete merupakan desa pesisir Sumba Barat bagian selatan yang terletak di Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi Desa Patiala Dete jika dilihat dari jarak tempuh menuju pusat Ibu Kota Kecamatan serta Ibu Kota Kabupaten sebagai berikut:

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan: 12 Km
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten: 30 Km
3. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan: 30 Menit
4. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten: 1 jam 20 Menit

Desa Patiala Dete sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian dari permukaan air laut 200 M sampai dengan 700 M, dengan luas wilayah 1.200 Ha dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sodana, sebelah timur berbatasan dengan Desa Haronakalla, sebelah selatan perbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan desa Gaura. Desa Patiala Dete berisiko tinggi terhadap bencana kekeringan apabila musim kemarau tiba. Oleh karena itu, kondisi ini membutuhkan droping air bersih dari bantuan pemerintah maupun secara swadaya. Kekurangan air ini disebabkan karena sumber mata air yang kering pada saat musim

kemarau dan sulit ditemukan titik sumber air untuk dilakukan pengeboran. Dilihat dari kondisi penduduk pada Desa Patiala Dete pada bulan Desember 2021, Balita berjumlah 134 jiwa, usia sekolah berjumlah 454 jiwa, usia produktif berjumlah 1018 jiwa dan lanjut usia berjumlah 482 jiwa.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Patiala Dete

Pemerintah Desa Patiala Dete melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan RPJMDesa. RPJMDesa ini mengarah pada kebijakan pembangunan desa dan menjadi panduan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Hal ini bertujuan untuk dapat menjaga kesinambungan pembangunan selama lima tahun terakhir dan menjadi dasar dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kerja yang dicanangkan. RKP Desa menjadi dasar dalam pembuatan APBDesa. Sekretaris bertanggungjawab terhadap pembuatan Rancangan APBDesa sesuai dengan Standar Harga dan Jasa (SHBJ). Dalam menyusun rencana, Pemerintah Desa Patiala Dete menggali aspirasi dari setiap dusun yang ada di Desa Patiala Dete kemudian mendiskusikannya melalui forum musrembang desa. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu informan, “*Kalou mengenai dengan perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan undang undang*

dana desa kami mengikuti alur penggalian gagasan dari masing-masing Dusun sesudah itu kami mengumpulkan aspirasi dari kalangan masyarakat kira-kira apa yang mereka butuhkan pada tahun berikutnya selain tahun berjalan, setelah semua di rekap oleh kepala dusun maka kami akan melakukan musyawarah desa yang disebut dengan musrenbang Desa di tahun berikut dan di wakili oleh masing-masing kepala dusun dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semua elemen yang ada di desa baik juga dari kecamatan maupun dari dinas kabupaten, disitu forum menyepakati apa-apa yang dilakukan ditahun berikutnya, dasarnya hasil dari penggalian dari masing-masing kepala dusun dilihat dari prioritas) (Hasil Wawancara dengan WK, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, berbagai *stakeholders* yakni tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh di level kecamatan, dan SKPD di level kabupaten. Musrenbangdes juga menyepakati program-program prioritas sehingga tepat dalam mengalokasikan anggaran.

Penggalian aspirasi kepada kelompok masyarakat kunci, juga disampaikan oleh salah satu perwakilan masyarakat. *"Dalam hal perencanaan penggunaan dana desa, pemerintah Desa Patiala Dete yang pertama menggali aspirasi dari setiap tokoh-tokoh masyarakat dalam forum musrenbang desa Kemudian pemerintah Desa Patiala Dete rembuk bersama (musyawarah) dengan*

mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan tokoh-tokoh lembaga desa yang ada seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa. Kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas dimana, program apa yang kita didahulukan yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat" (Hasil Wawancara dengan MN, 2021). Dalam pelaksanaan musrenbang desa perwakilan warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa dilibatkan untuk bersama-sama dengan pemerintah desa dalam merencanakan kegiatan yang akan disusun menjadi program kerja tahunan pemerintah desa. RAPBDesa yang disusun didiskusikan antara Kepala Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Setelah dua pihak tersebut menyetujui RAPBDesa, maka RAPBDesa tersebut diserahkan kepada Bupati melalui camat. RAPBDesa disahkan dan diatur dalam peraturan desa tentang APBDesa. RPJMDesa ini dipertanggungjawabkan ke masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program kerja yang didanai oleh dana desa, beberapa program kerja yang melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masyarakat digalakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan, *Ada beberapa program dari masa pemeritahan saya mulai dari tahun 2018 mulai dari pembangunan rumah layak huni, pembangunan rabat jalan desa, pembangunan gedung paud, bantuan mesin potong, bantuan lampu PLTS, bantuan lampu*

untuk penerangan setiap kampung, bantuan tangki solo, dan bantuan rutin obat-obatan untuk ketahanan pangan, rata-rata yang mendapatkan bantuan tersebut adek mahasiswa, itu rata-rata masyarakat yang kurang mampu, itu yang bisa kami sampaikan dari sisi beberapa program yang ada didesa kami” (Hasil Wawancara WK, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut juga dapat dipahami bahwa dana desa dialokasikan untuk pelayanan publik yang mengakomodasi kepentingan kaum rentan (*disadvantaged group*).

Berikut beberapa program kerja yang didanai oleh Dana Desa di Desa Patiala Dete.

Tabel 1. Rencana Anggaran Dan Realisasi Kegunaan Anggaran

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
1.	Pembangunan rumah layak huni 12 unit, dengan anggaran 240.000.000,00	240.000.000,00	Dalam perencanaan anggaran pembangunan rumah layak huni didesa patiala dete tidak mengalami kekurangan atau kelebihan dana mulai dari rencana anggaran dan dana yang sudah realisasi sudah

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
			sesuai dengan rencana anggaran tidak terjadi masalah apapun
2.	Pembangunan jalan rabat desa panjang 200 meter dengan anggaran 44.500.000,00	42.540.000,00	Dalam pembangunan rabat sisa anggaran 1.960.000 dan dikembalikan ke rekening kas desa untuk persiapan dari segala kekurangan dalam kegiatan Desa Patiala Dete.
3.	Pembangunan gedung paud 1 unit dengan anggaran 80.000.000,00	79.485.000,00	Dalam pembangunan paud di desa Patiala dete dengan anggaran 80.000.000,00 dan yang terrealisasi 79.485,000,00 dan sisa anggaran 515.000,00 disimpan di rekening kas desa untuk segala kekuaranga

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
			n penyelenggaraan Pemerintah Desa Patiala Dete.
4.	Program bantuan mesin potong 40 unit yang tersebar di 4 Dusun di desa Patiala dete dengan anggaran 140.000.000	140.000.000,00	Dalam perencanaan anggaran bantuan mesin potong di desa Patiala Dete tidak mengalami kekurangan atau kelebihan dana mulai dari rencana anggaran dan dana yang sudah realisasi sudah sesuai dengan rencana anggaran tidak terjadi masalah apapun.
5.	Bantuan mesin pompa air 15 unit dengan anggaran 52.500.000	52.500.000,00	Dalam perencanaan anggaran pengadaan mesin pompa air di desa Patiala Dete tidak mengalami kekurangan atau kelebihan

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
			dana mulai dari rencana anggaran dan dana yang sudah realisasi sudah sesuai dengan rencana anggaran tidak terjadi masalah apapun.
6.	Bantuan lampu penerangan untuk setiap kampung 40 unit dengan anggaran 28.000.000	28.000.000,00	Dalam perencanaan anggaran bantuan lampu penerangan disetiap kampung di desa Patiala Dete tidak mengalami kekurangan atau kelebihan dana mulai dari rencana anggaran dan dana yang sudah realisasi sudah sesuai dengan rencana anggaran tidak terjadi masalah apapun.
7.	Bantuan rutin obat-obatan untuk para	110.500.000,00	Dalam perencanaan anggaran bantuan

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
	petani setiap tahunnya dengan jumlah 1.300 liter dengan anggaran 110.500.000		obat-obatan untuk para petani di desa patiala dete tidak mengalami kekurangan atau kelebihan dana mulai dari rencana anggaran dan dana yang sudah realisasi sudah sesuai dengan rencana anggaran tidak terjadi masalah apapun.
8.	Pakian seragam Staf Desa 6 pcs, di desa patiala dete dengan jumlah anggaran 1.800.000,00	1.500.000,00	Jumlah anggaran buat pakian seragam pemerintah desa Patiala dete kecamatan laboya barat kabupaten sumba barat sebesar Rp. 1.800.000,00, dan kegunaan dana untuk membayar pakian seragam pemerintah desa sudah sesuai

N o.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
			dengan jumlah anggaran.
9.	Biaya telpon dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000,00	3.248.000,00	Dalam penganggaran telpon yang telah rencanakan sebesar 3.500.000,00 yang terealisasi 3.248.000,00 sisa anggaran 252.000,00 dan di kembalikan ke rekening kas desa untuk persiapan dari segala kekukurang dalam kegiatan Desa Patiala Dete.
10	Dana buat perjalanan dinas dengan jumlah anggaran Rp. 2.450.000,00	2.450.000,00	Rencana anggaran buat perjalanan dinas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.450.000,00 sudah sesuai dengan kegunaan anggaran untuk perjalanan

No.	Rencana Dan Jumlah Anggaran Tahun 2020	Realisasi Dana	Kegunaan Sisa Anggaran
			dinas di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat.
11	Pengadaan perlengkapan kantor desa seperti meja, kursi dan perlengkapan lainnya dengan anggaran sebesar 9.000.000,00	8.653.000,00	Dalam penganggaran telepon yang telah rencanakan sebesar 9.000.000,00 yang terealisasi 8.653.000,00 sisa anggaran 347.000,00 sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening kas desa untuk persiapan dari kekuarangan dalam penyelenggaraan kegiatan Desa Patiala Dete.

Sumber: Pemerintah Desa Patiala Dete, 2021
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan penelitian yang dilakukan di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat mengenai

pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete yaitu pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dari masing-masing kegiatan. Oleh sebab itu, dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan maupun pemberdayaan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan, serta kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Dalam pelaksanaan program dana desa Pemerintah Desa Patiala Dete menggunakan swakelola artinya dalam pengelolaannya program dana desa yang dapat diakomodir oleh Pemerintah Desa Patiala Dete maka program tersebut akan dikelola sendiri, sedangkan program yang tidak diakomodir oleh pemerintah Desa Patiala Dete akan dicarikan pihak ke tiga berdasarkan Undang-Undang Dana Desa.

Berkaitan dengan konsep efektivitas dalam penelitian ini menurut Siagian (2002) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete sudah sesuai dengan pelaksanaan program yang ada di Desa Patiala Dete dimana dalam pelaksanaan program diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengawasannya masih kurang maksimal. Pemerintah Desa Patiala Dete belum cukup menempatkan tim pengawasannya di berbagai titik pelaksanaan program. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Patiala Dete seperti kepala desa harus turun langsung untuk meninjau pelaksanaan program yang sedang berjalan, sehingga pemerintah Desa Patiala Dete dapat memastikan program yang sedang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Ditinjau dari sisi pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Patiala Dete menunjukkan akuntabilitasnya kepada pemerintah di level yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Salah satu informan menyatakan, *"Untuk pertanggung jawaban dana desa itu biasa bahwa setiap pengelolaan keuangan desa pasti dipertanggung jawabkan dan pasti harus diperiksa, dan ini selalu setiap tahun pertanggung jawaban kami aktifkan dan laporan pertanggung jawaban ini kami laporkan di setiap akhir tahun, baik ditingkat kecamatan maupun di dinas inspektorat, itu yang bisa kami sampaikan adek mahasiswa dari sisi pertanggung jawaban"*. (Wawancara kepada KD, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa laporan tertulis diberikan kepada pemerintah di level kecamatan dan di tingkat kabupaten melalui inspektorat daerah.

Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Patiala Dete diawali dengan melakukan rekapan pengeluaran anggaran setiap bulan program yang sedang dilaksanakan. Rekapan ini dilakukan agar pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada tim pemeriksaan dari kabupaten pada saat program sedang berjalan. Selanjutnya Pemerintah Desa Patiala Dete melakukan rekapan anggaran yang sudah terealisasi di akhir tahun dari setiap program yang ada di Desa Patiala Dete. Kemudian Pemerintah Desa Patiala Dete melaporkan hasil rekapan dari setiap program yang telah terealisasi di tingkat kabupaten melalui camat. Pemerintah Desa Patiala Dete kemudian mengundang seluruh elemen yang ada di Desa Patiala Dete untuk membahas dan melaporkan hasil program yang sudah terealisasi kepada masyarakat melalui forum diskusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Patiala Dete. Hal tersebut rutin dilakukan setiap akhir tahun oleh Pemerintah Desa Patiala Dete kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban program dana desa kepada masyarakat. Selanjutnya sisa anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan dikembalikan ke kas Pemerintah Desa Patiala Dete. Hal ini menandakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya diterapkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat (*social accountability*) sehingga penerapan

prinsip akuntabilitas ini dapat menjaga kebermanfaatan dari dana desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dengan adanya dana desa direspon positif oleh beberapa kelompok masyarakat. Salah satu informan menyatakan, *"pandangan masyarakat mengenai program yang ada di desa, sebetulnya tidak ada yang tidak mendukung, semuanya juga masyarakat mendukung, begitu juga programnya selesai tidak ada yang mengkritik negatif, apalagi masyarakat merasakan sendiri keuntungan dari program yang dilaksanakan, misalnya bantuan obat hama ya masyarakat mereka bersyukur sekali, disini tau sendiri juga kan pendapatan masyarakat tidak ada lain selain pertanian, ya dengan adanya bantuan obat hama ini mereka terbantu sekali."*(Wawancara kepada MA, 2021). Beberapa informan penelitian juga menyatakan bahwa program yang ada di Desa Patiala Dete sudah sangat baik, dilihat dari program yang ada di Desa Patiala Dete seperti bantuan obat pertanian sangat membantu bagi petani karena pekerjaan masyarakat Desa Patiala Dete mayoritas petani. Dilihat dari bantuan lampu PLTS melalui program dana desa masyarakat Desa Patiala Dete sangat terbantu mengingat belum seluruh Desa Patiala Dete dialiri listrik.

Di sisi lain, informan lainnya berpendapat, *"tanggapan masyarakat sampai saat ini positif, hanya beberapa saja yang SDMnya minim yang masih beranggapan bahwa program seperti bantuan obat-obatan kenapa tidak dikasih secara tunai saja, dan memang itu tidak bisa kami berikan secara tunai, karena dalam perencanaan yang disepakati bersama dalam forum musrembang desa dan disahkan ditingkat kecamatan, kami dituntut untuk menyuply dalam bentuk barang, seperti itu secara umumnya yang bisa kami jelaskan adek mahasiswa"*. (Wawancara kepada NK 11 November 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ada kelompok masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap implementasi program-program yang didanai oleh dana desa, khususnya terkait proses pemberian pelayanan publik. Hal ini terjadi karena untuk memastikan bahwa bentuk pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencapai pada tujuan dari pemberian pelayanan publik.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah Desa Patiala Dete mengalami hambatan. Salah satu hambatannya adalah waktu. Masalah waktu sering dialami oleh pemerintah Desa Patiala Dete dalam hal pencairan anggaran dana desa. Pencairan anggaran dana desa yang relatif lambat menyebabkan program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa Patiala

Dete terhambat dan waktu pelaksanaannya ikut mengalami kemunduran. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan, *"Mengenal hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete salah satunya adalah waktu. Ketika kegiatan yang telah direncanakan atau dimasukkan ke dalam program yang akan direalisasikan, waktu pencairan dana desa mengalami keterlambatan, hal ini sering kami alami setiap pencairan dana desa, demikian juga program yang kami telah direncanakan akan mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya"* (Hasil Wawancara dengan JK, 2021).

Proses mencairkan dana desa sangat ketat dan tersistem. Ketika dana desa tidak tepat waktu pencairannya, maka kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi sulit untuk mencapai efektivitas pengelolaannya. Seperti di Desa Patiala Dete, ketika telah ditentukan suatu program bantuan obat hama pada bulan Mei 2021 namun harus diundur karena biaya yang belum cair. Selain terhambatnya pencairan dana, berdasarkan pernyataan dari beberapa informan dalam penelitian. bencana alam merupakan salah satu faktor dalam mencapai efektivitas pengelolaan dana desa di desa Patiala Dete. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan, *"ketika terjadi bencana alam maka ini yang kami prioritaskan, kami alihkan anggaran program yang kami suda rencanakan untuk mengatasi bencana alam yang sedang terjadi"*. (Hasil

Wawancara dengan JK, 2021). Bencana alam menyebabkan kerusakan harta benda yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah Desa Patiala Dete mengambil langkah pengalihan anggaran program yang sudah direncanakan untuk mengatasi bencana alam tersebut.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Patiala Dete sudah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dana desa berdasarkan pada RPJMDesa dan diturunkan dalam RKP Desa setiap tahunnya. Hal ini menjadi dasar dalam pembuatan APBDesa. Program-program yang didanai sesuai dengan rencana yang dibuat, walaupun beberapa penyesuaian karena adanya hambatan terkait waktu pencairan dana desa dan bencana alam. Masyarakat memberikan respon positif dan negatif terhadap program yang sudah dilaksanakan. Efektivitas dana desa di Desa Patiala Dete didukung oleh adanya proses penggalian aspirasi masyarakat melalui forum diskusi baik dari sisi perencanaan maupun pertanggungjawaban, ada platform untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat, pengelolaan dana secara swakelola, dan penerapan prinsip akuntabilitas ke pemerintah di level yang lebih atas dan masyarakat.

Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan adalah

1. Pemerintah desa sebaiknya memaksimalkan sistem pengawasan pengelolaan dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2. Pemerintah di level lebih atas sebaiknya mempercepat proses pencairan sehingga pelayanan publik yang diberikan tepat waktu dan tepat guna.
3. Pemerintah desa menyediakan alokasi dana darurat sehingga ketika terjadi bencana alam, hal ini tidak mengganggu jalannya program kerja yang didanai oleh dana desa

Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Adriyanto. (2021). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021. Diunduh pada

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>

Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan

Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Diunduh pada https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Moenir, 2006, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara

Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*. US: Pearson Education, Inc

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Sari, RN, Ribawanto, H, dan Said. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3, No. 11, Hal. 1880-1885

Siagian Sondang P., 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta